

---

---

## Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Jepang dalam “Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement” (IJEPA) Tahun 2008

Aldo Chandra Tarumingi<sup>1)</sup>, Sukma Sushanti<sup>2)</sup>, A. A Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

1)

---

### Abstrak

Studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan mekanisme kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Studi ini menggunakan konsep Kerjasama Internasional dalam menggambarkan mekanisme kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang melalui perjanjian IJEPA dan dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder bersumber pada dokumentasi dan jurnal. Adapun data dikumpulkan melalui metode studi pustaka yang kemudian dianalisis melalui pendekatan Miles and Huberman. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme kerjasama IJEPA antara pemerintah Indonesia dan Jepang dilakukan dengan disepakatinya skema preferensi tarif yaitu meliputi skema penurunan tarif umum dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, serta dilakukan kerjasama pembangunan kapasitas (capacity building) melalui program manufacturing industry development center (MIDEC), akan tetapi selama di implementasikan sejak tahun 2008, IJEPA tidak memberikan hasil maksimal dan menguntungkan, sehingga melalui pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam agenda penyelesaian general review IJEPA, kedua negara sepakat untuk melakukan peningkatan kerjasama dengan di tanda tangannya Framework Document New Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)

**Kata-kunci** : IJEPA, Kerjasama Bilateral, Kerjasama Indonesia-Jepang

---

### Abstract

*Current study proposed to identify and describe the mechanism of cooperation between Indonesia and Japan in the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). This study uses the concept of International Cooperation in describing the mechanism of economic cooperation between Indonesia and Japan through the IJEPA agreement and is carried out through a descriptive qualitative approach with secondary data sourced from documentation and journals. The data was collected through the literature study method which was then analyzed using the Miles and Huberman approach. The findings show that the IJEPA cooperation mechanism between the governments of Indonesia and Japan is carried out by agreeing on a tariff preference scheme which includes a general tariff reduction scheme and granting import duty exemption facilities, as well as carrying out capacity building cooperation through the manufacturing industry development center (MIDEC) program. but as long as it has been implemented since 2008, IJEPA has not provided maximum and profitable results, so that through a bilateral meeting between Indonesia and Japan on the agenda for completing the IJEPA general review, the two countries agreed to increase cooperation by signing the Framework Document New Manufacturing Industry Development Center (MIDEC)*

**Keywords** : Bilateral Cooperation, IJEPA, Indonesia-Japan Cooperation

---

**Kontak Penulis**

Aldo Chandra Tarumingi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. Sekar Jepun 6, no. 42, Denpasar Timur, Bali, 80237

Telp: +62 813-3992-0605 Fax: -

E-mail : tarumingialdo@gmail.com

## PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dapat dikatakan sebagai fenomena dalam hubungan internasional yang terjadi lewat terbentuknya satu kekuatan pasar dari negara-negara diseluruh dunia, yang terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Segala bentuk batasan ataupun hambatan pada arus modal barang serta jasa sengaja dihapuskan guna memperlancar arus globalisasi ekonomi (Wahab, 2013). Dengan kata lain, globalisasi ekonomi mengakibatkan setiap negara menjadi saling ketergantungan, memanfaatkan peluang yang ada, serta meminimalisir dampak negatif pada negara masing-masing (Apridar, 2012).

Salah satu bentuk hasil dari globalisasi ekonomi adalah *Free Trade Agreement* (FTA) yang dapat dideskripsikan sebagai suatu persetujuan diantara negara yang ditujukan untuk menghilangkan hambatan tarif serta non-tarif dalam arus perdagangan secara internasional. FTA terus mengalami perkembangan dimana dalam dunia internasional kegiatan ekonomi saat ini selain berkaitan dengan perdagangan, juga berkaitan dengan investasi luar negeri hingga kerjasama tenaga kerja. Dengan demikian, perkembangan FTA menjadi FTA plus atau *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang merujuk pada kerjasama ekonomi secara komprehensif mencakup beberapa aspek seperti: *joint ventures*, *capacity building*, perjanjian tenaga kerja, serta investasi.

Adapun salah satu wujud kerjasama EPA yaitu "*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)", yaitu persetujuan kerjasama bilateral pada aspek ekonomi yang terjalin diantara pihak pemerintah Indonesia dengan Jepang yang ditujukan guna mendorong peningkatan pada perdagangan antar negara serta investasi antar negara sehingga hal ini juga dapat menguatkan hubungan pada kedua negara (Gocklas dan Sulasmiyati, 2017). IJEPA memiliki ruang lingkup yang lebih luas yang berperan krusial dalam menjalin hubungan lebih erat khususnya

terkait hubungan ekonomi diantara kedua negara seperti perjanjian liberalisasi, *capacity building*, perjanjian kerjasama perdagangan, serta investasi (Kementrian Perdagangan RI, 2018). Lewat kerjasama IJEPA terdapat banyak hal yang disepakati oleh Indonesia dan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara seperti perdagangan dan investasi.

Pada kerjasama IJEPA ini terdapat 3 pilar utama yang menjadi tujuan dari IJEPA yaitu: (Kementrian Perdagangan RI, 2018). Pertama yaitu liberalisasi perdagangan, yang mana IJEPA menghapus hambatan pada arus perdagangan khususnya terkait dengan bea masuk dan investasi khususnya terkait dengan kejelasan hukum. Kedua, Fasilitasi Perdagangan, yang mana IJEPA menjadi jembatan yang memberikan fasilitas kerjasama standarisasi, jasa perdagangan, hingga perbaikan iklim investasi guna mendorong keyakinan investor Jepang untuk melakukan investasi di perusahaan Indonesia. Terakhir adalah *Capacity Building*, yaitu pemberian ruang oleh IJEPA bagi kedua belah pihak guna menjalankan kerjasama guna mendorong peningkatan pada daya saing produsen Indonesia.

Selama ini terdapat banyak hal yang dibahas pada setiap pertemuan delegasi oleh kedua negara, yaitu investasi, pariwisata, perdagangan dan kebudayaan. Saat ini hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Jepang telah diperkuat dengan adanya peningkatan kerjasama pada bidang ekonomi yaitu IJEPA (Kunjana, 2018) khususnya dalam hal perdagangan ekspor-impor ([id.emb-japan.go.jp](http://id.emb-japan.go.jp), n.d).

Melalui hal ini, maka dapat dikatakan bahwa hubungan ekonomi yang terjalin pada dua negara ini sudah cukup kuat sehingga mendorong kedua negara untuk memperkuat hubungan dengan disusunnya kerjasama atau perjanjian bilateral sesuai dengan *economic agreement* IJEPA. Kebijakan IJEPA yang telah direncanakan semenjak tahun 2004 dan kemudian didiskusikan pada tahun 2005, pada

akhirnya mulai terealisasi pada tahun 2008 yang mana dapat dikatakan membutuhkan waktu yang relatif singkat.

Kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dan Jepang melalui IJEPA merupakan kerjasama antar dua negara yang memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Indonesia posisinya sebagai negara berkembang sedangkan Jepang adalah negara maju. Oleh karena itu dengan adanya kerjasama IJEPA ini apakah kedua negara akan saling menguntungkan satu sama lain, dan dengan dibuatnya kerjasama IJEPA apakah bisa kedua negara membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membawa kedua negara mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan yang nantinya akan memberikan kontribusi pada penelitian ini yang bertema tentang kerjasama lewat perjanjian ekonomi. Tulisan pertama yang digunakan adalah penelitian yang berjudul "Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia" yang ditulis oleh Hestherriilda Martha Putrika tahun 2017. Studi ini membahas terkait kepentingan Indonesia dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia lewat kerangka "Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)".

Terdapat kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai Indonesia dalam kerjasama ekonomi komprehensif dengan Australia yaitu antara lain berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, perdagangan, dan investasi. Terdapat hambatan-hambatan yang terjadi pada perundingan yang merupakan proses penyelesaian IA-CEPA yaitu, yang pertama pada tahun 2013 perundingan IA-CEPA sempat berhenti setelah putaran kedua. Hambatan lain yang terjadi adalah terdapat beberapa kali revisi yang dilakukan masing-masing negara dalam negosiasi terkait pembukaan akses pasar sehingga membutuhkan waktu yang panjang kedua negara untuk mencapai kesepakatan. tulisan ini membantu

penulis mengetahui pentingnya suatu kerjasama bilateral lewat perjanjian ekonomi bagi suatu negara, adanya kerjasama bilateral seperti (Economic Partnership Agreement) dapat memberi banyak manfaat pada kedua negara khususnya pada pengembangan sumber daya manusia, perdagangan, dan investasi.

Tulisan kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Nelly Yuswani Togatorop pada tahun 2018 yang berjudul "Kerjasama Indonesia – Jepang Melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Ekspor Ikan Tuna (2012-2017)." Tulisan ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang melalui "Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)" dalam perdagangan ekspor ikan tuna (2012-2017). Dalam studi ini dijelaskan bahwa melalui perjanjian IJEPA dapat memberikan manfaat seperti pengurangan tarif dan semakin terbukanya pasar. Indonesia memperoleh keuntungan dari peningkatan ekspor ikan tuna ke Jepang dan bagi Jepang keuntungan diperoleh dari pemanfaatan tarif IJEPA pada komoditas lain yang berdampak pada kenaikan kontribusi import. Tulisan ini berkontribusi pada penelitian penulis sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership agreement (IJEPA).

Tulisan ketiga yang digunakan adalah penelitian yang di tulis oleh Alfajri pada tahun 2017 yang berjudul "Kepentingan Indonesia Menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement Dengan Uni Eropa Tahun 2011-2016". Terdapat beberapa hal yang disepakati anatar Indonesia dan Uni Eropa pada perjanjian kemitraan ini yang sekaligus menjadi kepentingan nasional pemerintah yaitu; "1) Kebijakan penurunan tarif oleh Uni Eropa untuk Indonesia, 2) Penghapusan tarif khusus dari Uni Eropa, dan 3) Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan peluang pasar Uni Eropa kepada pengusaha dari Indonesia." Terdapat kesamaan kesepakatan diantara perjanjian kemitraan ekonomi

Indonesia dan Uni Eropa dengan IJEPA yaitu pada kebijakan penurunan tarif dan penghapusan tarif pada sektor perdagangan. Kesamaan isu tentang perjanjian kemitraan ekonomi tersebut yang membuat tulisan ini digunakan sebagai kajian pustaka pada penelitian penulis.

Penelitian ini menggunakan konsep Kerjasama Internasional dalam menggambarkan mekanisme kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang melalui perjanjian IJEPA. Kerjasama Internasional dapat diartikan sebagai hubungan kolaboratif antara entitas yang saling bekerjasama guna tercapainya pembagian kerja sesuai dengan kesepakatan. Kerjasama internasional ada sebagai koordinasi kebijakan antar negara yang melibatkan dua mekanisme utama: politisasi dan timbal balik. Politisasi masalah transnasional memberikan dorongan untuk kerjasama tetapi juga dapat menghambatnya. Timbal balik adalah katalis untuk kerjasama. Cara aktor yang berbeda terlibat dengan mekanisme ini menentukan kemungkinan hasil yang kooperatif (Mckenzie, 2020).

Ekonomi menjadi salah satu bidang dalam kerjasama internasional, kerjasama ekonomi adalah komponen kerja dari kerjasama internasional dan berfungsi sebagai suatu upaya yang diperlukan untuk memfasilitasi proses integrasi ekonomi seperti perdagangan hingga keuangan dalam kawasan internasional, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi tidak langsung dalam jangka menengah dan Panjang (O'Farrill, 1999). Bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang adalah kerjasama perjanjian bilateral. Negara-negara dapat memperluas serta memperbesar cakupan pasar dan mendapatkan peluang dalam memasarkan produknya tanpa adanya hambatan dalam impor maupun ekspor dengan mengambil kebijakan liberalisasi. Tercapainya kebijakan liberalisasi pada dasarnya dapat berupa penurunan hambatan perdagangan atau diberlakukannya subsidi impor (Purba, 2021).

Maka untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Lebih lanjut, studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan mekanisme kerjasama yang terjalin sesuai IJEPA.

## METODE

Studi ini terlaksana melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun data yang digunakan khususnya terkait Kerjasama Internasional pada bidang ekonomi antara Indonesia dan Jepang mengenai perjanjian perdagangan, investasi, hingga tenaga kerja dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, rentan waktu yang ambil dari kerjasama ini adalah 2007 hingga 2015 yang diperoleh melalui dokumentasi, buku, hingga penelitian terdahulu. Selanjutnya, unit analisis yang akan diteliti ialah kelompok dalam hal ini kelompok tersebut adalah negara yaitu kerjasama bilateral lewat perjanjian ekonomi (IJEPA) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang meliputi kementerian luar negeri, kementerian perdagangan hingga kementerian keuangan dengan pemerintah Jepang. Kemudian, data akan dianalisis dengan deskripsi kata-kata dalam bentuk teks naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Jepang memiliki hubungan ekonomi yang ditujukan untuk memperkuat hubungan yang terjalin diantara kedua negara dengan sepakat untuk membuat perjanjian ekonomi melalui kerangka kerjasama bilateral yaitu *Economic Partnership Agreement (EPA)* yang mana pertemuan pertama dilakukan di tahun 2003 dengan mendiskusikan hal-hal mendasar dari pembentukan EPA seperti negosiasi, kondisi ekonomi, hingga kebijakan perdagangan kedua negara. Hubungan kerjasama yang terjalin antara Jepang dan Indonesia telah berlangsung di berbagai bidang, yang mana kedua belah pihak memiliki kepentingan komersial bersama

yang cukup besar dan ada sifat perdagangan dan struktur investasi yang saling melengkapi antara Jepang dan Indonesia.

Pertemuan ini merupakan langkah awal proses pembentukan IJEPA, yang selanjutnya pada tahun 2004 Indonesia dan Jepang menyelesaikan Joint Study Group sebagai bagian dari perundingan IJEPA yang dimulai pada tahun 2005 hingga IJEPA disepakati oleh kedua negara pada tahun 2007. IJEPA bertujuan untuk memperkuat dan mempromosikan hubungan ekonomi yang saling memberikan keuntungan antara kedua negara, dan mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan kerjasama berlapis-lapis untuk peningkatan kapasitas dalam berbagai cara.

Lebih lanjut, dalam proses perundingan ini terdapat sebelas isu yang menjadi pembahasan dalam *Joint Study Group* yang akan disepakati sebagai cakupan bidang dalam IJEPA yaitu peragangan barang, prosedur kepabeanan, kekayaan intelektual, kebijakan persaingan, standar dan kesesuaian/saling pengakuan, investasi/perdagangan jasa, sumber daya mineral/energi, pergerakan orang/sumber daya manusia, pengadaan pemerintah, peningkatan lingkungan bisnis, serta kerjasama (Joint Study Group, 2005).

### **Mekanisme kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang dalam IJEPA**

Mekanisme kerjasama IJEPA antara pemerintah Indonesia dan Jepang mulai dilakukan dengan disepakatinya skema penurunan tarif umum dan pemeberian fasilitas perdagangan melalui skema "*user specific duty-free scheme (USDFS)*" yang diberikan Indonesia kepada Jepang, sebagai bentuk kompensasi terhadap fasilitas USDFS pihak Jepang membantu Indonesia pada pengembangan kapasitas melalui program *manufacturing industry development center (MIDEC)*.

Perjanjian perdagangan yang disepakati oleh Indonesia dan Jepang melalui kerjasama IJEPA sebagai bentuk liberalisasi perdagangan

adalah kebijakan penurunan tarif pada perdagangan barang kedua negara. Kebijakan penurunan tarif bea masuk merupakan upaya kedua negara dalam meminimalisir halangan yang selama ini dapat menyulitkan arus barang ekspor-impor kedua negara, serta ditujukan untuk memperbesar akses pasar antar kedua negara. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka IJEPA melalui skema penurunan tarif ini akan memperluas akses pasar untuk produk ekspor kedua negara. Kerjasama IJEPA melalui skema penurunan tarif ini juga memberi peluang bagi industri dalam negeri melalui peningkatan nilai ekspor.

Kebijakan penurunan tarif melalui skema preferensi tarif umum yang disepakati antara Indonesia dan Jepang di atur ke dalam 3 klasifikasi yaitu fast track, normal track, exclusion. Pada kerjasama IJEPA pihak Indonesia membuka akses pasarnya melalui pemberlakuan tarif khusus atau penurunan tarif sekitar 93 persen dari total 11.163 pos tarif linanya untuk produk Jepang. Pada produk klasifikasi fast track akan di turunkan sekitar 35 persen pos tarif, untuk normal track akan di turunkan sekitar 58 persen pos tarif dan untuk sisanya dari total keseluruhan pos tarif yaitu 7 persen akan dikecualikan dari penurunan tarif IJEPA. Sedangkan pihak Jepang akan membuka akses pasarnya melalui pemberlakuan tarif khusus atau penurunan tarif sekitar 90 persen dari total 9.275 pos tarif linanya untuk produk Indonesia. Pada produk klasifikasi fast track akan di turunkan sekitar 80 persen pos tarif, normal track akan di turunkan sekitar 10 persen pos tarif dan untuk sisanya dari total keseluruhan pos tarif yaitu 10 persen akan di kecualikan dari penurunan tarif IJEPA.

Dalam kebijakan penurunan tarif melalui skema preferensi tarif umum di sektor perdagangan, terdapat tambahan fasilitas berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh pihak Indonesia khusus terhadap produk-produk bahan baku Jepang. Fasilitas pembebasan tarif bea masuk ini di formulasikan kedalam skema *user spesific duty free scheme (USDFS)*, yang merupakan

penetapan tarif bea masuk khusus kepada industri yang berbadan hukum dan sudah sesuai dengan SKVI-USDFS di Indonesia. Pemberian fasilitas perdagangan ini sebagai upaya pihak Indonesia terkait peningkatan nilai investasi terutama dalam sektor manufaktur Jepang di Indonesia.

Adapun hasil kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan Jepang terkait dengan fasilitas USDFS yaitu, kedua negara sepakat bahwa penggunaan fasilitas USDFS diberlakukan untuk barang impor dari Jepang terkait dengan sektor penggerak yang menjadi kepentingan bersama yakni: *automotive, motorcycle, construction machineries and heavy equipment; gas and electric power*, semua produk tersebut belum dibuat di Indonesia dan harus berbentuk bahan baku bukan komponen atau produk jadi, yang terkait langsung dengan empat sektor penggerak yang disepakati bersama, serta tidak mempengaruhi produk dalam negeri yang sejenisnya.

Selain penurunan tarif bea masuk dan pemberian fasilitas perdagangan, IJEPA telah memberi ruang kepada Indonesia dan Jepang untuk melakukan kerjasama pembangunan kapasitas yakni *manufacturing industri development center* (MIDEC) yang merupakan kegiatan sekaligus sebagai motor penggerak untuk pengembangan industri manufaktur di Indonesia dalam rangka memajukan empat sektor penggerak yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.

Kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas industri dengan meliputi bidang kegiatan seperti *basic study, pelatihan, (trainee and trainer)* dan teknologi (*technical assistance*). Kehadiran MIDEC khususnya pada industri manufaktur diharapkan Indonesia mampu menjadi basis produksi (*production based*), sehingga dapat mengeksport produk hasil industri manufaktur ke luar negeri dengan harga yang kompetitif dan memiliki nilai tambah tinggi.

Program kerjasama pengembangan industri manufaktur melalui program MIDEC telah di Implementasikan sejak tahun 2008. Setelah beberapa tahun di implementasikan pihak Indonesia melakukan evaluasi terhadap program MIDEC dan pada tahun 2019 melalui pertemuan antara pihak Indonesia dan Jepang dalam agenda evaluasi implementasi IJEPA, kedua negara sepakat untuk melakukan peningkatan kerjasama pada pengembangan industri manufaktur yang kemudian melalui pertemuan ini program MIDEC bertransformasi menjadi *new MIDEC*.

Kerjasama *new MIDEC* disepakati kedua negara melalui penandatanganan *Framework Document on New MIDEC* di bawah kerangka IJEPA oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dan Ministry of Economy, Trade, and Investment (METI) Jepang, Hiroshige Seko di Osaka, Jepang tahun 2019 pada pertemuan bilateral Indonesia dan Jepang dalam agenda general review IJEPA sekaligus sebagai hasil negosiasi dari penyelesaian GR IJEPA. *New MIDEC* adalah program yang memiliki cakupan kegiatan yang komprehensif, yaitu seperti sektor otomotif, elektronik, logam, tekstil, makanan dan minuman, serta mencakup kegiatan lintas sektoral yaitu meliputi pengerjaan logam seperti pencetakan dan pengelasan, promosi ekspor dan impor, pengembangan UKM, industri hijau dan industri 4.0 (Kementerian Perdagangan RI, 2019).

### **Dinamika kerjasama Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement***

Selama pengimplementasian IJEPA sejak tahun 2008 kerjasama ini di nilai kurang maksimal dan tidak menguntungkan khususnya bagi Indonesia. Menurut kementerian perindustrian Republik Indonesia selama pelaksanaannya beberapa fasilitas yang di berikan IJEPA tidak dimanfaatkan secara optimal salah satunya seperti fasilitas pembebasan bea masuk yang tidak dimanfaatkan secara merata yang dinominasi oleh sektor otomotif.

Tidak hanya pemanfaatan fasilitas yang kurang optimal, selain itu juga kerjasama pada perdagangan barang dinilai kurang maksimal, selama pengimplementasiannya ekspor Indonesia ke Jepang mengalami penurunan rata-rata 6,6% per tahun hal ini dikarenakan tidak adanya perkembangan pada produk ekspor Indonesia ke Jepang yang hanya di dominasi oleh sektor yang sama tidak disemua sektor (Kementerian perindustrian, 2013).

Salah satu kerjasama IJEPa yang telah di implementasi dan memiliki keterkaitan dengan produk-produk ekspor Indonesia khususnya pada industri manufaktur adalah MIDEc. Selama diimplementasikan kerjasama dalam meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui program MIDEc tidak memberikan hasil optimal, dari 13 sektor industri yang disepakati untuk di garap hanya lima sektor yang implementasinya baik serta ada beberapa sektor yang pencapaian targetnya belum maksimal seperti produksi alat berat (Bisnis Indonesia, 2013).

Permasalahan yang di temukan dan menjadi faktor tidak optimalnya pengimplementasian MIDEc adalah pertama pada administrasi pengelolaan proyek MIDEc yang tidak ditangani secara khusus sehingga menyulitkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek. Kedua kebutuhan peningkatan daya saing produk industri untuk ekspor belum menjadi dasar utama dari inisiatif proyek MIDEc dan selama ini proyek MIDEc hanya di fokuskan pada Kajian Dasar (*Basic Study*), Pengiriman Tenaga Ahli, Pelatihan, dan Seminar. Ketiga informasi terkait dengan proyek MIDEc belum di sosialisasikan dengan baik kepada *stakeholder* (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2015).

Pada tahun 2013 pihak Indonesia mengusulkan agar IJEPa di tinjau kembali atau dilakukan evaluasi terhadap perjanjian yang sudah di implementasikan, usulan dilakukan tinjauan implementasi IJEPa merujuk pada pasal 151 perjanjian IJEPa untuk melakukan tinjauan implementasi (*general review*) liam tahun setelah perjanjian dilaksanakan atau di

implementasi yang bertujuan untuk melihat hasil implementasi perjanjian serta dampaknya terhadap kedua negara. Sehingga pada tahun 2015 tim perundingan kedua negara melakukan pertemuan di tingkat komite bersama dalam kerangka General Review IJEPa (kemendag, 2017).

Peninjauan kembali IJEPa yang di usulkan merupakan bentuk upaya dari pihak Indonesia dalam mengevaluasi kinerja dan hasil implementasi IJEPa sejak tahun 2008. Pada pertemuan di tingkat komite bersama general review IJEPa tahun 2018 pihak Indonesia memfokuskan kepentingannya pada perluasan akses pasar produk potensial seperti sektor industri, perikanan, pertanian hingga kehutanan. Melalui pertemuan ini terdapat usulan kerjasama baru sekaligus pembahasan awal terkait dengan sektor Industri yaitu *New MIDEc* (Septian,2018).

Sebelumnya pihak Indonesia melalui kementerian perindustrian menyatakan bahwa perlu adanya evaluasi di setiap sektor terkait dengan hasil pelaksanaan program MIDEc, karena bagi Indonesia kerjasama tersebut di nilai kurang optimal terdapat hambatan dan tidak tercapainya target pada pengimplementasinya. Upaya yang dilakukan pihak Indonesia dalam mengevaluasi hasil implementasi MIDEc menjadi dasar pembahasan kedua negara terkait dengan MIDEc sekaligus menghasilkan usulan kerjasama *new MIDEc* pada pertemuan peninjauan implementasi IJEPa.

Diadakanya evaluasi implementasi IJEPa oleh kedua negara diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang memberi keuntungan bersama atau *win-win solution*. Selain itu lewat pertemuan ini kedepanya diharapkan adanya koordinasi yang baik di antara kedua pihak sehingga dapat mengatasi perbedaan yang terjadi selama ini antara Indonesia dan Jepang. Pada pertemuan dalam rangka mengevaluasi implementasi IJEPa Indonesia dan Jepang telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama di sektor perdagangan dan investasi di kedua negara.

Evaluasi yang telah dilakukan mendorong Indonesia untuk menekankan perlunya peningkatan akses pasar pada komoditas pertanian, kehutanan, perikanan dan industri di sektor perdagangan (Darmastuti, 2022).

## PENUTUP

Mengacu pada analisis deksriptif yang telah dilaksanakan terkait dengan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang dalam IJEP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengetahui serta mendeskripsikan mekanisme kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership agreement* (IJEP). Kerjasama IJEP merupakan kerjasama ekonomi yang komprehensif. Melalui kerjasama IJEP Jepang membuka peluang pengiriman tenaga kerja Indonesia yaitu perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk bekerja di Jepang, yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan tenaga kerja perawat di Jepang.

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement telah di Implementasikan sejak tahun 2008 akan tetapi selama pelaksanaannya IJEP dinilai kurang maksimal dan tidak menguntungkan khususnya bagi Indonesia. Terdapat permasalahan yang ditemukan yang mempengaruhi efektifitas pengimplementasian IJEP yaitu pertama pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk yang tidak merata, hanya dinominasi oleh sektor otomotif. Kedua kerjasama perdagangan barang dinilai kurang maksimal yaitu selama pengimplementasiannya ekspor Indonesia ke Jepang mengalami penurunan. Ketiga, melalui program MIDECE tidak memberikan hasil optimal, selain itu terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan administrasi, kegiatan teknis hingga stakeholder.

Pada pertemuan kedua negara dalam meninjau kembali implementasi perjanjian IJEP salah satu fokus pembahasan Indonesia adalah perluasan akses pasar pada produk-produk potensial. Mengacu pada hasil evaluasi sebelumnya terkait dengan hasil pelaksanaan

program MIDECE yang di nilai tidak memberikan hasil maksimal, sehingga melalui pertemuan ini terdapat usulan kerjasama baru sekaligus pembahasan awal terkait dengan sektor Industri yaitu *new manufacturing industry development center* (New MIDECE). New MIDECE adalah program yang memiliki cakupan kegiatan yang komprehensif, yaitu seperti sektor otomotif, elektronik, logam, tekstil, makanan dan minuman, serta mencakup kegiatan lintas sektoral yaitu meliputi pengerjaan logam seperti pencetakan dan pengelasan, promosi ekspor dan impor, pengembangan UKM, industri hijau dan industri 4.0.

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui studi ini yakni, pertama, diharapkan kepada kedua pihak pemerintah kedepannya untuk memastikan pengimplementasian IJEP melalui kesepakatan baru mampu memberikan hasil maksimal dengan keuntungan yang sama, mengingat pengimplementasian IJEP sebelum dilakukan evaluasi kurang maksimal. Kedua, diharapkan kedua negara berkomitmen agar tetap melakukan evaluasi terhadap pengimplementasian IJEP sesuai dengan perjanjian sehingga kerjasama IJEP terus memberi hasil yang baik.

Terakhir, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu membahas bentuk kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang melalui kerangka EPA, dengan isu lain diluar sektor perdagangan barang, seperti politik, budaya dan lainnya, selain itu pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa membahas lebih dalam terkait dengan isu tenaga kerja dalam IJEP.

## Daftar Pustaka

- Apridar, 2012. *Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Atmawinata, Achdiat. 2008. *Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global "Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDECE-IJEP"*. <https://kemenperin.go.id/download/131/Kedalaman->

Struktur-Industri-yang-Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global

- Bisnis Indonesia. 2013 IJEPA Tak Berikan Manfaat Signifikan bagi Indonesia. <https://kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagi-Indonesia>
- Global Forum on Migration & Development, 2015. Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA). <https://www.gfmd.org/pfp/ppd/2358>
- Gocklas C.S, Levi., & Sulasmiyati, Sri., 2017. "Analisis Pengaruh Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang" Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 50 No. 5.
- [id.emb-japan.go.jp](http://id.emb-japan.go.jp), Hubungan Perekonomian Indonesia – Japan. [https://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco\\_id.html](https://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html)
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017, "Fact Sheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2013. Pemanfaatan Fasilitas IJEPA Kurang Optimal. <https://kemenperin.go.id/artikel/5805/Pemanfaatan-Fasilitas-IJEPA-Kurang-Optimal>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2013. RI-Jepang Tingkatkan Daya Saing Industri Melalui Kerjasama MIDEC. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/6538/RI-Jepang-Tingkatkan-Daya-Saing-Industri-Melalui-Kerjasama-MIDEC>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2015. MIDEC : New Initiative Approach. <https://adoc.pub/m-i-d-e-c-manufacturing-industry-development-center.html>
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2018. Fact Sheet Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). [https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20180515\\_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf](https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf)
- Kunjana, Gora., 2018. 60 Tahun Indonesia-Jepang. <https://investor.id/archive/60-tahun-indonesia-jepang>
- Septian, Risman. 2018. Lewat GR-IJEPA, Indonesia-Jepang Upayakan Hasil Seimbang dan Menguntungkan. <https://pontas.id/2018/12/03/lewat-gr-ijepa-indonesia-jepang-upayakan-hasil-seimbang-dan-menguntungkan/>
- Wahab, Abdul, (2013), Ekonomi Internasional, Alauddin University Press.